

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan yang berfungsi menerima *input* (masukan), mengolah *input*, dan menghasilkan *output* (keluaran) yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁰ Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisir dan diproses sehingga bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. SIA dapat berupa sistem manual maupun sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru.¹¹

Suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan. Ciri-ciri sistem informasi adalah:

1. Satu-kesatuan organisasi

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm.

1

¹¹ TM Books, *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 6

2. Bagian-bagian perangkat jaringan, sumber daya manusia basis data dan informasi
3. Terjalin erat tercermin dalam bentuk hubungan, interaksi, prosedur kerja sama antar manajemen dan subsistem komputer.
4. Mencapai tujuan menghasilkan informasi yang berkualitas bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.¹²

Sistem Informasi Akuntansi menghasilkan informasi akuntansi yang dapat dipergunakan untuk:

1. Mendukung kegiatan rutin
2. Mendukung keputusan
3. Perencanaan dan pengendalian.¹³

Komponen-komponen yang terdapat pada sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengoperasikan sistem tersebut
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam pengumpulan, pemrosesan. Dan penyimpanan data aktivitas-aktivitas organisasi
3. Data tentang proses bisnis
4. *Software* yang dipakai untuk memproses data organisasi
5. Infrastruktur teknologi informasi.¹⁴

¹² I Cenik Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 5

¹³ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm.

B. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Pemerintah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007. Atas dasar tersebut pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah (penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya

4. Menyajikan informasi yang akurat.¹⁵

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.¹⁶

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi, karena SIPKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait

¹⁵ Maulana Yusup, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2016, hlm. 153

¹⁶ Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010, Kementerian Dalam Negeri: Jakarta, hlm. 15

lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.¹⁷

Elemen-elemen SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), ada 2 (dua) alternative yang dapat dipilih dalam menghasilkan laporan keuangan melalui aplikasi SIPKD yaitu:

1. Laporan keuangan lengkap

Laporan keuang lengkap antara lain menghasilkan dokumen-dokuen sebagai berikut:

- a. Buku jurnal SKPD
- b. Buku jurnal PPKD
- c. Buku Besar Rekening Anggaran
- d. Buku Besar Rekening Neraca
- e. Laporan Realisasi Anggaran
- f. Laporan Arus Kas
- g. Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi

2. Laporan keuangan standart

Laporan keuangan standard antara lain menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Arus Kas
- c. Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi.

¹⁷ Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 428-429

Sementara dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan berupa dokumen SPJ, BKU Bendahara dan Buku Jurnal serta Buku Besar dapat dilengkapi secara manual.¹⁸ Dalam penerapan SIPKD opini BPK WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standard.¹⁹ Hal ini mengindikasikan suatu kemajuan akan kinerja instansi di pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang-undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat diukur menggunakan indikator berikut:

1. Keamanan data
2. Kecepatan dan ketepatan waktu
3. Ketelitian
4. Variasi laporan atau output dan
5. Relevansi sistem.²⁰

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik

¹⁸ Yusup, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan,*hlm. 154-155

¹⁹ Sari, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan,*hlm. 4

²⁰ Yusup, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan,*hlm. 153

dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi processing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi sektor publik utamanya pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.²¹

Teknologi informasi sangat berperan terhadap perkembangan akuntansi utamanya membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang lebih mudah, efektif, efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.²² Pada dasarnya, sebuah sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi bisnis dengan cara sebagai berikut:

1. Dapat memperbaiki produk atau jasa dengan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, atau menambah atribut yang diinginkan konsumen

²¹ Sari, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan,* hlm. 5

²² Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 4

2. Dapat meningkatkan efisiensi
3. Dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuatan keputusan
4. Dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan
5. Dapat memperbaiki komunikasi
6. Dapat memperbaiki penggunaan pengetahuan.²³

Dalam pemanfaatan teknologi pada sistem informasi akuntansi perlu memperhatikan beberapa komponen pendukung, yaitu

1. User yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
4. Software yang digunakan untuk memproses data
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari komputer, peripheral device, dan perangkat jaringan
6. Pengendalian internal untuk menjaga keamanan data sistem informasi akuntansi.²⁴

Melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi, maka indikator yang digunakan untuk mengkaji pemanfaatan teknologi pada instansi pemerintah daerah yaitu

1. Ketepatan waktu hasil output.
2. Alat pendukung sistem.

²³*Ibid*, hlm.13-14

²⁴ TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi*,hlm. 7

3. Ketersediaan hardware dan software.
4. Kecepatan dan keakuratan output.
5. Dapat memperbaiki output.²⁵

D. Pengendalian Intern

Pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.²⁶ Tujuan ketaatan (*compliance*) dari pengendalian internal menekankan pada kemampuan pengendalian tersebut untuk memastikan bahwa setiap peraturan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh pihak eksternal (pemerintah, pemegang saham) maupun oleh pihak internal (manajemen), ditaati dan diimplementasikan oleh setiap orang/unit dalam suatu entitas organisasi. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang dalam organisasi.²⁷

Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Struktur pengendalian intern memiliki tiga elemen, yaitu:

²⁵ Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi*, hlm. 349

²⁶ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, hlm. 216

²⁷ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, hlm. 69

1. Lingkungan pengendalian internal

Lingkungan pengendalian internal menjadi faktor utama yang menentukan tingkat keefektifan sistem pengendalian internal, terutama karena menyangkut kualitas kesadaran etis dan kompetensi oknum-oknum pimpinan dan orang-orang di dalam suatu entitas. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan:²⁸

a. Aspek integritas, nilai-nilai moral

Pelanggaran etika dan kurangnya integritas sering kali terjadi. Integritas dan nilai-nilai etika akan terjaga dengan baik apabila budaya perusahaan yang terbutuk mendukungnya. Budaya perusahaan meliputi keyakinan umum, praktik dan perilaku para karyawannya.²⁹

b. Komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dengan pengetahuan, pengalaman pelatihan, dan keahlian sangat penting untuk memfungsikan proses pengendalian internal.³⁰

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi

Pengendalian yang efektif diawali dari filosofi manajemen. Kesadaran akan pentingnya pengendalian dikomunikasikan ke bawahan melalui gaya operasi manajemen.³¹

d. Partisipasi komite audit

²⁸ Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi*,hlm. 78

²⁹ TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi*.....hlm. 63

³⁰ *Ibid*, hlm. 63

³¹ *Ibid*, hlm. 63

Audit merupakan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi memberikan kerangka bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan operasi. Aspek penting dari struktur organisasi adalah sentralisasi atau desentralisasi wewenang dalam organisasi dan bagaimana alokasi tanggung jawab tersebut mempengaruhi informasi yang diperlukan.³²

f. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia, dan

Kebijakan sumber daya manusia meliputi pembagian tugas, penyeliaan (supervision), dan rotasi jabatan. Tanggung jawab atas tugas tertentu dalam organisasi harus jelas dan tertulis dalam manual dan deskripsi pekerjaan.³³

g. Perhatian serta pengarahan manajemen terhadap entitas dan karyawannya

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan organisasi untuk mengurangi resiko dan mencapai tujuan pengendalian. Pengendalian aliran pekerjaan digunakan untuk mengendalikan suatu proses dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Pengendalian aliran pekerjaan berfokus

³² *Ibid*, hlm. 64-66

³³ *Ibid*, hlm. 66

pada tanggung jawab atas kejadian, urutan kejadian, dan aliran informasi antara kejadian.³⁴

2. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. Sistem akuntansi yang efektif memberikan dasar yang memadai untuk penetapan metoda dan catatan yang akan berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang sa
- b. Menguraikan secara tepat waktu transaksi bisnis secara rinci sehingga memungkinkan klasifikasi transaksi secara tepat untuk pelaporan keuangan
- c. Mengukur nilai transaksi secara tepat sehingga memungkinkan pencatatan sebesar nilai moneterinya dalam laporan keuangan
- d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi sehingga memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat
- e. Menyajikan secara tepat transaksi dan pengungkapan lain yang terkait dalam laporan keuangan.

3. Presedur pengendalian

³⁴ *Ibid*, hlm. 70

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas
- b. Pemisahan tugas yang mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam tugas rutinnnya, yaitu dengan menempatkan orang yang berbeda pada fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan aktiva
- c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menjamin pencatatan transaksi secara tepat
- d. Penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan
- e. Pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap nilai yang tercatat.³⁵

Tujuan pengendalian internal dilihat dari perspektif sistem informasi akuntansi, lebih ditujukan untuk membantu manajemen melakukan pengamanan asset perusahaan, dan membina sistem informasi akuntansi yang andal dan dapat dipercaya. Untuk mencapai kedua tujuan ini maka pengendalian internal harus

³⁵ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*,hlm. 217

mengacu pada prinsi-prinsip pengendalian internal sebagai berikut:³⁶

a. Menetapkan tanggung jawab

Kontrol akan lebih efektif, jika setiap tugas tertentu ditetapkan satu pejabat khusus yang bertanggung jawab. Bila ada suayu tugas, atau pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang tanpa kejelasan maka akan sering timbul suasana dan sikap saling lempr tanggung jawab dalam hal terjadinya kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dalam menjalankan tugas.

b. Pemisahan tugas

Prinsip pemisahan tugas merupakan salah satu prinsip penting dalam proses pengendalian internal. Prinsip ini diterapkan untuk dua hal:

c. Beberapa orang ditugaskan secara terpisah untuk melaksanakan satu rangkaian kegiatan.

d. Pemisahan fungsi pencatatan (akuntansi) dengan fungsi penyimpanan asset dan fungsi otorisasi transaksi.

Dalam prinsip pemisahan tugas, penting diperhatikan adanya pemisahan tiga fungsi dalam setiap organisaasi yaitu: fungsi akuntansi, fungsi penyimpanan dan fungsi otorisas.³⁷

1. Prosedur dokumentasi

³⁶ Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi*,hlm. 80

³⁷ *Ibid*, hlm. 80-81

Dokumentasi berarti membuat berbagai kebijakan, prosedur, sistem, instruksi kerja, panduan, dan sejenisnya dalam bentuk deskripsi tertulis dalam bentuk teks, gambar, atau bagan alir (*flowchart*). Dokumen berfungsi sebagai alat bukti transaksi yang sangat penting. Semua pencatatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen pendukung yang sah, akurat, dan lengkap.

Dokumentasi prosedur menjelaskan suatu mekanisme, proses, atau tahapan yang melewati beberapa orang, atau bagian tentang bagaimana dokumen transaksi disiapkan, dibuat, dan diperiksa oleh, serta didistribusikan ke berbagai pihak termasuk ke bagian akuntansi untuk proses pencatatan akuntansi.

2. Kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik

Pengamanan asset perusahaan secara fisik dengan memanfaatkan teknologi peralatan baik yang bersifat mekanis maupun elektronik sudah semakin banyak digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta.

3. Verifikasi internal yang bersifat independen

Sistem pengendalian internal yang efektif juga banyak memanfaatkan fungsi verifikasi yang dilakukan oleh

petugas/pejabat internal yang bersifat independen atas suatu aktivitas atau operasi tertentu.³⁸

4. Alat kontrol lainnya

Beberapa sistem dan alat control lainnya yang juga banyak digunakan antara lain: rotasi atau mutasi petugas, mengecek referensi dari pihak mantan atasan karyawan yang bersangkutan pada saat melakukan proses rekrutmen, mengasuransikan petugas dalam bentuk asuransi perlindungan atas penyalahgunaan asset perusahaan dan sebagainya.³⁹

Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan indikator berikut:

1. Adanya *Standar Operating Procedure* (SOP)
2. Pemisahan wewenang
3. Dokumen dan catatan yang memadai
4. Tindakan disiplin atas pelanggaran
5. Pembatasan akses.⁴⁰

E. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu daftar financial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir

³⁸ *Ibid*, hlm. 82

³⁹ *Ibid*, hlm. 83

⁴⁰ Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi*,hlm. 76

periode; atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode.⁴¹

Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standart. Berikut beberapa kriteria kualitas informasi keuangan:⁴²

1. Relevan

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambilan suaytu keputusan, maka informasi demikian tidak ada gunanya.

2. Dapat diuji

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses pengukuran dan penyajian informasi tidak lagi berlandaskan realitas objektif semata.⁴³

3. Dapat dimengerti

Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentukn yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai.

4. Netral

⁴¹Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa*,.....hlm. 35

⁴²*Ibid*, hlm. 4

⁴³*Ibid*, hlm. 5

Laporan keuangan atau informasi keuangan itu diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung kepada kebutuhan pihak tertentu.

5. Tepat waktu

Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

6. Daya banding

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama.⁴⁴

7. Lengkap

Informasi keuangan lengkap bila memenuhi enam tujuan kualitatif diatas dan dapat memenuhi standard pengungkapan laporan keuangan. Standard itu menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting dan penyajian fakta secara jelas agar tidak menyesatkan pemakainya.

Informasi keuangan dari suatu perusahaan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dengan informasi keuangan yang diperoleh, mereka menganalisisnya dan kemudian menentukan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Maka penyusunan laporan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 6

keuangan juga harus memenuhi kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi:

1. Relevan

Informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemakainya. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif, umpan balik dan tepat waktu.

- a. Informasi memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat membantu para pemakainya untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan berdasarkan peristiwa (transaksi) masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
- b. Informasi memiliki umpan balik (*feedback*) jika informasi tersebut dapat mendukung atau memberi masukan untuk memperbaiki prediksi yang sudah dibuat oleh para pemakainya,
- c. Tepat waktu berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainya. Dengan demikian, informasi itu tidak kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan yang diambil.⁴⁵

2. Handal (*reliable*)

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 33-34

Informasi tersebut dapat dipercaya karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah informasi yang memenuhi syarat: dapat diperiksa, penyajian yang jujur dan netral.

- a. Dapat diperiksa artinya laporan keuangan (informasi akuntansi) tersebut jika di audit/diperiksa oleh beberapa auditor eksternal yang menggunakan metode sama akan memperoleh kesimpulan yang sama pula
- b. Penyajian yang jujur artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan kondisi transaksi keuangan sebenarnya (kondisi riil) tanpa adanya rekayasa.
- c. Netral artinya tidak berpihak kepada golongan pemakai informasi tertentu.⁴⁶

Kualitas sekunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna/pemakainya. Kualitas sekunder meliputi:

1. Keterbandingan

Informasi laporan keuangan suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu informasi dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 34

dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda.

2. Konsistensi

Dalam menyajikan informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Namun, jika terjadi perubahan metode (perlakuan) akuntansi maka pada periode dilaksanakannya perubahan itu perusahaan harus mengungkap (dalam laporan keuangannya) tentang berbagai hal yang terkait dengan perubahan itu.⁴⁷

Lebih singkatnya nilai-nilai yang terkandung laporan keuangan pemerintah daerah juga mengandung nilai-nilai yang tercantum didalam prinsip akuntansi syariah yang meliputi nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi. Makna yang terkandung dalam tiga prinsip umum tersebut terdapat dalam sura Al-Baqarah: 282:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Implikasi dalam akuntansi bahwa individu/instansi yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 34-35

diperbuat kepada pihak-pihak terkait dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam melakukan transaksi dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas dicatat dengan benar. Keadilan dalam konteks aplikasi syariah berkaitan dengan praktik moral kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan dan berkaitan dengan nilai-nilai etika/syariah dan moral.

3. Prinsip kebenaran

Dalam akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.⁴⁸

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan komitmen Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan yang kualitatif merupakan laporan keuangan yang

⁴⁸Ali Mauludi AC, *AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif, Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 62

berisi informasi sesuai dengan kriteria berikut: handal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.⁴⁹

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan laporan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Tujuan dari laporan keuangan sektor publik yaitu:

1. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan fungsinya
2. Melaporkan hasil operasi
3. Melaporkan kondisi keuangan
4. Melaporkan sumberdaya jangka panjang.

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, social dan politik. Evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga memperhatikan rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sector publik dapat memberikan informasi mengenai pengurusan dan ketaatan, kondisi keuangan, kinerja dan dampak ekonomi.⁵⁰

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya didaerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk

⁴⁹ Yusup, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan*,hlm.155

⁵⁰ *Ibid*, hlm.156

mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit erja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investyor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik.⁵¹

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang actual dan factual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan. (realisasi v.s. anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,

⁵¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 2

3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait,
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.⁵²

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan indikator-indikator berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keterandalan
4. Dapat diperbandingkan
5. Transparansi.⁵³

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Internal guna Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

⁵² *Ibid*, hlm. 3-4

⁵³ *Ibid*, hlm. 11

Penelitian Darmayani tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan SIPKD, dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian hipotesis adalah sebagai berikut: Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, Penerapan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil uji secara simultan dapat disimpulkan Kualitas SDM, Penerapan SIPKD, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel X yang sama yakni penerapan SIPKD dan Pengendalian Intern. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel X kualitas SDM dan variabel Y nilai laporan keuangan bagian keuangan.⁵⁴

Penelitian Sari tujuan penelitian ini untuk secara empiris mengetahui pengaruh SIPKD, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan Pemanfaatan teknologi terhadap kualitas

⁵⁴ Made Ayu Darmayani, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 1

laporan keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Artinya semakin baik Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Dengan demikian semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar $Adj. R^2 = 0,691$. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel SIPKD, SPI, SAP dan pemanfaatan teknologi informasi

sebesar 69,10%. Sementara sekitar 40,90% dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan beberapa variabel X yang sama yakni SIPKD, Pengendalian Intern, dan pemanfaatan teknologi dan penggunaan variabel Y yang sama terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan beberapa variabel X yakni standar akuntansi pemerintah.⁵⁵

Penelitian Putri tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman regulasi standar akuntansi

⁵⁵ Sari, *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*,hlm. 1

pemerintahan berbasis akrual, system pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pengujian kontribusi secara simultan oleh variabel-variabel bebas (R^2) sebesar 95,6%. Persamaan dengan penelitian terletak pada penggunaan beberapa variabel X yakni kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, serta variabel Y adalah kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan beberapa variabel X berikut pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah.⁵⁶

Penelitian Pradono bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan pemerintah daerah keuangan dan masalah/kendala yang dihadapi oleh SKPD di penyusunan laporan keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil isian kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti maupun tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden bagian akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

⁵⁶ Ismi Desintha Putri, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 1

pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan beberapa variabel X yang sama yakni pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (y). Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan beberapa variabel X yakni rekonsiliasi dan peran PKK - SPKPD.⁵⁷

Penelitian Setyowati bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang bagian akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel X peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada

⁵⁷ Febrian Cahyo Pradono, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 22 No. 2, 2015, hlm. 1

penggunaan variabel X kompetensi sumber daya manusia dan internal audit.⁵⁸

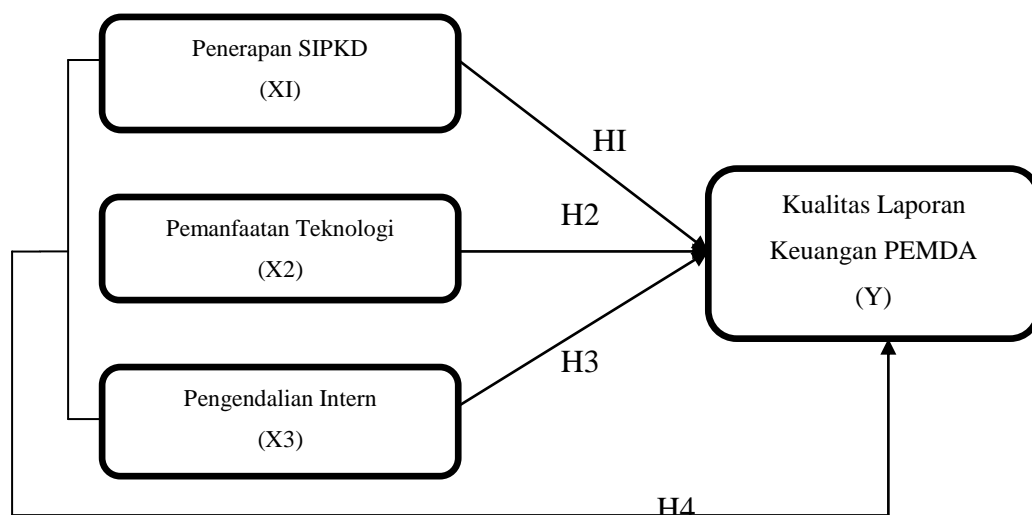
G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, didasarkan pada rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan dari penelitian terdahulu. Berdasarkan judul penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung. Variabel penelitiannya yaitu Penerapan SIPKD (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2), Pengendalian intern (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung. Berikut dikemukakan kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian diatas:

⁵⁸ Lilis Setyowati, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang”, *Kinerja*, Vol. 20 No. 2, 2016, hlm. 1

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019

Keterangan:

1. Pengaruh variabel penerapan SIPKD (X1) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Yani⁵⁹, serta didukung dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Ratna Sari.⁶⁰
2. Pengaruh variabel Pemanfaatan Teknologi (X2) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Krismiaji⁶¹, serta didukung dalam

⁵⁹ Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)

⁶⁰ Sari, Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem,hlm. 21

⁶¹ Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi,hlm. 23

kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono.⁶²

3. Pengaruh variabel Pengendalian Intern (X3) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh I Cenik Ardana⁶³, serta didukung dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iami Deshinta Sari.⁶⁴
4. Pengaruh variabel penerapan SIPKD (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2) dan Pengendalian Intern (X3) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara bersama-sama.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesa merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoriis dan dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset.⁶⁵ Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

⁶² Pradono, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang*,hlm. 15

⁶³ Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi*, hlm. 11

⁶⁴ Putri, "*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi*,hlm. 19

⁶⁵ Rokhmat Subagiyo, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam*", (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 55

H₂: Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₃: Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₄: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pemanfaatan Teknologi, Pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.